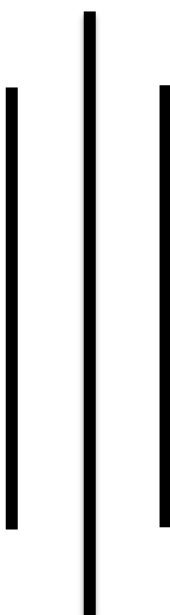




**LAPORAN KEUANGAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN PREMBUN
TAHUN ANGGARAN 2025**



**KECAMATAN PREMBUN
KABUPATEN KEBUMEN**



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN PREMBUN

Jalan Jeruk Nomor 5 Prembun Telepon : (0287) 662321
Kode Pos 54394

Email: kec-prembun@kebumenkab.go.id
Website: <http://kec-prembun.kebumenkab.go.id>

Prembun, 12 Februari 2026

Yth. Bupati Kebumen
Cq. Kepala BPKPD Kab. Kebumen
Di-

KEBUMEN

SURAT PENGANTAR

Nomor : 900.1.3.6/234/2026

No	Jenis surat yang dikirim	Banyaknya	Keterangan
1.	Laporan Keuangan OPD Kecamatan Prembun Tahun 2025.	1 buku	Dikirim dengan hormat untuk menjadikan periksa dan guna seperlunya



Martinus Yudiantoro, S.STP, M.Si
Pembina Tk I
NIP. 19820623 200012 1 001

Tembusan :

Inspektur Daerah Kabupaten Kebumen

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Martinus Yudiantoro, S.STP, M.Si
NIP : 19820623 200012 1 001
Jabatan : Camat Prembun
SKPD/OPD/Unit : Kecamatan Prembun

Bahwa untuk kelancaran dan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah, dengan ini menyatakan bahwa :

1. Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Kecamatan Prembun untuk periode 1 Januari s/d 31 Desember 2025 merupakan tanggungjawab saya selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
2. Laporan Keuangan SKPD/OPD/unit kerja BLUD sebagaimana tersebut nomor 1 yang menjadi tanggungjawab saya meliputi:
 - a) Laporan Realisasi Anggaran;
 - b) Laporan Operasional;
 - c) Neraca;
 - d) Laporan Perubahan Ekuitas;
 - e) Catatan atas Laporan Keuangan (CALK).
3. Laporan Keuangan tersebut disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Kebumen, 03 Februari 2026

CAMAT PREMBUN
KABUPATEN KEBUMEN



Martinus Yudiantoro, S.STP, M.Si
Pembina Tk I
NIP. 19820623 200012 1 001

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN OPD KECAMATAN PREMBUN KABUPATEN KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 2025

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan OPD Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen disusun sebagai wujud pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas / pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah daerah pada OPD Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2025 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Berwibawa dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional;
4. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

7. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 14 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

23. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 94 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual Pemerintah Kabupaten Kebumen;
24. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;

1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Bab I	Pendahuluan	
	1.1	Maksud dan tujuan laporan keuangan SKPD
	1.2	Landasan Hukum penyusunan laporan keuangan SKPD
	1.3	Sistematika Penulisan Catatan atas laporan keuangan SKPD
Bab II	Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan SKPD	
	2.1	Ikhtisar Realisasi pencapaian target kinerja keuangan SKPD
	2.2	Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan
Bab III	Penjelasan Pos -pos Laporan Keuangan SKPD	
	3.1	Rincian dari penjelasan masing-masing pos pelaporan keuangan SKPD :
		3.1.1 LRA
		3.1.2 L O
		3.1.3 Neraca
		3.1.4 LPE
		3.1.5 CALK
	3.2	Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas yang menggunakan basis akrual.
Bab IV	Penjelasan dan informasi-informasi non keuangan	
Bab V	Penutup	

BAB II

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD

2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

a. Pendapatan

Realisasi Pendapatan – LRA yang diperoleh selama Tahun Anggaran 2025 sejak 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025 mencapai sebesar Rp2.200.000,- atau 110 % dari anggaran sebesar Rp 2.000.000,- . Dan mengalami penurunan 65,5% dari pendapatan tahun 2024 sebesar Rp3.510.000,-.

Tabel berikut menunjukkan realisasi pendapatan yang dicapai.

Anggaran dan Realisasi Pendapatan – LRA

No	Jenis Pendapatan	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Lebih / (Kurang) (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1.	Sewa Retribusi Tanah dan Bangunan	Rp 2.000.000,-	Rp 2.200.000,-	Rp 200.000,-	110 %	Rp 3.510.000,-

a. Belanja

Realisasi Belanja TA 2025 sebesar Rp. 1.982.595.731,- dari anggaran sebesar Rp. 2.415.075.000,- atau mencapai 82,09%. Dan bila dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp 2.500.750.846,- dari anggaran sebesar Rp.2.552.043.000,- atau mencapai 97,99%. Dan mengalami penurunan sebesar 15,9%.

1. Realisasi Belanja Per Akun

Rician realisasi belanja per akun disajikan sebagai berikut :

URAIAN JENIS BELANJA	ANGGARAN T.A. 2025	REALISASI T.A. 2025	PROSENTASE %
B. BELANJA			
Belanja Operasi			
1. Belanja Pegawai	2.129.568.000	1.699.208.034	79,79
2. Belanja Barang	252.307.000	250.360.440	99,22
3. Belanja Hibah	-	-	
Jumlah Belanja Operasi	2.381.875.000	1.949.568.474	81,85
Belanja Modal			
1. Belanja Modal Tanah	-	-	
2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	33.200.000	33.027.257	99,47

URAIAN JENIS BELANJA	ANGGARAN T.A. 2025	REALISASI T.A. 2025	PROSENTASE %
3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	
4. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	-	-	
Jumlah Belanja Modal	33.200.000	33.027.257	99,47
JUMLAH BELANJA	2.415.075.000	1.982.595.731	82,09

2. Realisasi Belanja Per Kegiatan

Rician realisasi belanja per kegiatan disajikan sebagai berikut :

URAIAN JENIS BELANJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN TA 2025	REALISASI TA 2025	%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.306.417.000	1.824.673.094	79,11
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.400.000	5.330.750	98,72
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.800.000	1.798.350	99,91
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.600.000	3.532.400	98,12
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.142.365.000	1.661.192.557	77,54
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.129.568.000	1.649.550.277	77,46
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12.797.000	11.642.280	90,98
Administrasi Umum Perangkat Daerah	47.942.000	47.833.820	99,77
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.750.000	6.743.920	99,91
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12.600.000	12.568.000	99,75
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.592.000	8.591.900	100,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	1.500.000	1.500.000	100,00
Penyediaan Bahan/Material	15.000.000	15.000.000	100,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3.500.000	3.430.000	98,00
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	33.200.000	33.027.257	99,48
Pengadaan Mebel	15.000.000	15.000.000	100,00
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.200.000	8.027.257	97,89
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.000.000	10.000.000	100,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	38.010.000	37.843.710	99,56
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500.000	500.000	100,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	30.000.000	29.856.210	99,52
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	7.510.000	7.487.500	99,70

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	39.500.000	39.445.000	99,86
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	24.500.000	24.445.000	99,78
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.000.000	5.000.000	100,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10.000.000	10.000.000	100,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	11.350.000	11.329.500	99,82
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	11.350.000	11.329.500	99,82
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	6.350.000	6.349.500	99,99
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	5.000.000	4.980.000	99,60
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	9.340.000	9.306.592	99,64
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	9.340.000	9.306.592	99,64
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	9.340.000	9.306.592	99,64
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	87.968.000	87.628.788	99,61
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	87.968.000	87.628.788	99,61
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	6.023.000	5.885.000	97,71
Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	9.010.000	9.007.478	99,97
Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	10.865.000	10.820.376	99,59
Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	4.515.000	4.488.780	99,42
Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	14.740.000	14.675.800	99,56
Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	33.015.000	32.992.517	99,93
Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	9.800.000	9.758.837	99,58
	2.415.075.000	1.932.937.974	80,04

2.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

Hambatan yang dihadapi secara umum dalam pencapaian target anggaran yang telah ditetapkan pada Tahun Anggaran 2025 dapat kami uraikan sebagai berikut :

a. Pendapatan

Pendapatan Retribusi Daerah terealisasi sekitar 110%, dibanding tahun 2024 pendapatan tahun ini mengalami penurunan dikarenakan berkurangan pihak yang menyewa pendopo.

b. Belanja

1. Belanja yang tidak terserap sebagai berikut:

- SubKegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan pagu anggaran Rp 2.129.568.000 dengan realisasi Rp 1.699.208.034 atau sebesar 79,79%, angka ini menunjukkan kurang maksimal dikarenakan adanya kekosongan Pejabat Struktural yang tidak terisi dalam waktu yang cukup lama, sehingga penyerapan pada anggaran Gaji dan Tunjangan ASN tidak terserap secara maksimal.
- SubKegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD dengan pagu anggaran Rp 12.797.000 dengan realisasi Rp 11.642.280 atau sebesar 90,98%, angka ini masih terbilang belum maksimal nya penyerapan dikarenakan beberapa rekening belanja yang pada saat penyusunan anggaran terkait honor-honor angkanya lebih tinggi dari SSH.

Selain sub kegiatan diatas sudah mengalami penyerapan yang cukup bagus hanya mengalami sisa anggaran dikarenakan adanya efisiensi anggaran.

BAB III
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN
RINCIAN DARI PENJELASAN MASING-MASING POS PELAPORAN KEUANGAN
PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD

1. Laporan Realisasi Anggaran

1. Pendapatan – LRA

Jumlah anggaran Pendapatan Tahun 2025 sebesar Rp 2.000.000,- Terealisasi sebesar Rp 2.200.000,- atau 110 % dari target yang ditetapkan. Realisasi Pendapatan OPD Kecamatan Prembun Tahun Anggaran 2025.

Pendapatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih / (Kurang) (Rp)	%	*)Realisasi 2025 (Rp)
Pendapatan Asli Daerah	Rp 2.000.000,-	Rp 2.200.000,-	Rp 200.000,-	110 %	Rp 2.200.000,-

Pendapatan OPD Kecamatan Prembun Tahun Anggaran 2025 mencapai target sebesar 110 % dari anggaran namun turun 65,5% % dari Realisasi Tahun 2024.

a) Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 2.200.000 terdiri dari:

Pendapatan Asli Daerah	2025		%	Realisasi 2024 (Audited) (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
Pajak Daerah				
Retribusi Daerah	2.200.000	2.200.00	110%	3.510.000
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan				
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah				
Jumlah	2.200.000	2.200.00	110%	3.510.000

Pajak Daerah	Anggaran	Realisasi
	Rp 0	Rp.0

Pajak Daerah sebesar Rp.0,00 terdiri dari:

Pajak Daerah	2025		%	Realisasi 2024 (Audited) (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
Pajak Hotel				
Pajak Restoran				
Pajak Hiburan				

Pajak Daerah	2025		%	Realisasi 2024
Pajak Reklame	NIHIL			
Pajak Penerangan Jalan				
Pajak Parkir				
Pajak Air Tanah				
Pajak Sarang Burung Walet				
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan				
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan				
BPHTB				
Jumlah				

Pendapatan dari Pajak Daerah Tahun 2025 terealisasi sebesar .0 % naik sebesar 0 % dibandingkan pendapatan Pajak Daerah Tahun 2024 yang sebesar Rp.0,00. Dari rincian objek pendapatan Pajak Daerah, yang melampaui adalah pajak Rp. 0 sebesar 0 %, sedangkan yang tidak melampaui target adalah pajak Rp.0 yang terealisasi sebesar 0 %, hal itu disebabkan tidak ada pajak dibandingkan dengan realisasi Tahun 2020, terdapat rincian pendapatan pajak daerah yang mengalami peningkatan yaitu...0..... dan rincian objek tidak mencapai target yaitu Pajak 0 disebabkan tidak ada pajak

2) Retribusi Daerah	Anggaran	Realisasi
	Rp 2.000.000	Rp.2.200.000

Retribusi Daerah yang dikelola OPD Kecamatan Prembun sebesar Rp.0,00 terdiri dari:

Retribusi	Tahun 2025		%	Realisasi 2024 (Audited) (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
Retribusi Sewa Asset	2.000.000	2.200.000	110	3.510.000
Retribusi Pelayanan Kesehatan				
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan				
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum				
Retribusi Pelayanan Pasar				
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor				
Retribusi Pelayanan Pendidikan	NIHIL			
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah				
Retribusi Tempat Pelelangan				
Retribusi Terminal				
Retribusi Tempat Khusus Parkir				
Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa				

Retribusi Rumah Potong Hewan				
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga				
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah				
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	0,00	0,00	0%	0
Retribusi Izin Gangguan				
Retribusi Izin Trayek				
Jumlah	2.000.000	2.200.000	110	3.510.000

Pendapatan dari Retribusi terealisasi 110 %, mengalami penurunan sebesar 65,5 % jika dibandingkan pendapatan Retribusi Tahun 2024 yang sebesar Rp. 3.510.000. Hal itu disebabkan karena tidak ada pendapatan.

Pendapatan dari Retribusi Daerah Tahun 2025 Rp 2.200.000, terealisasi 110% dengan rincian penyetoran sebagai berikut :

- Pendapatan pada tanggal 05 Februari 2025 sebesar Rp 400.000 sewa pendopo Kecamatan Prembun a.n Koperasi PGP Kecamatan Prembun.
- Pendapatan pada tanggal 06 Maret 2025 sebesar Rp 500.000 sewa pendopo Kecamatan Prembun a.n Siti Setiati.
- Pendapatan pada tanggal 15 Mei 2025 sebesar Rp 400.000 sewa pendopo Kecamatan Prembun a.n IBI RSUD Prembun.
- Pendapatan pada tanggal 15 Juli 2025 sebesar Rp 400.000 sewa pendopo Kecamatan Prembun a.n Koperasi PWRI MES Kecamatan Prembun.
- Pendapatan pada tanggal 20 Agustus 2025 sebesar Rp 500.000 sewa pendopo Kecamatan Prembun a.n Wim Salasa Pamularsih

b) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah yang dikelola OPD.Kecamatan Prembun terealisasi sebesar Rp.0,00 dari anggaran sebesar Rp.0,00 terdiri dari:

Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	2025		(%)	Realisasi 2024 (Audited) (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	NIHIL			
Penerimaan Jasa Giro				
Pendapatan Bunga				
Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan				
Pendapatan denda pajak				
Pendapatan denda retribusi	NIHIL			
Pendapatan dari pengembalian				

Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	2025		(%)	Realisasi 2024 (Audited) (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
Pendapatan dari BLUD				
Lain-lain PAD yang syah lainnya				
Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum				
Hasil Pengelolaan dana Bergulir				
Dana BOS				
Jumlah				

Pendapatan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun 2025 terealisasi 0 %, naik sebesar 0 % dibandingkan Pendapatan Lain-Lain PAD yang sah Tahun 2024 yang sebesar Rp.0,00. Rincian objek pada Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah yang melampaui target anggaran yang ditetapkan adalah pendapatan NIHIL yaitu sebesar .0 %. Sedangkan untuk yang tidak mencapai target yaitu pendapatan NIHIL.

2. Belanja - LRA

Realisasi belanja OPD Kecamatan Prembun TA. 2025 adalah sebesar Rp. 1.982.595.731 atau 82,09% dari anggaran sebesar Rp. 2.415.075.000.

Rincian Anggaran dan realisasi belanja TA.2025 tersaji sebagai berikut :

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2025

URAIAN	2025		%	Realisasi 2024 (Audited) (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
BELANJA				
Belanja Operasi				
1. Belanja Pegawai	2.129.568.000	1.699.208.034	79,79	1.827.929.061
2. Belanja Barang	252.307.000	250.360.440	99,22	1.460.139.067
3. Belanja Hibah	-	-		
4. Belanja bantuan Sosial				
Jumlah Belanja Operasi	2.381.875.000	1.949.568.474	81,85	3.288.068.128
Belanja Modal				
1. Belanja Modal Tanah	-	-		
2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	33.200.000	33.027.257	99,48	20.677.000
3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-		
4. Belanja Modal Jalan Irigasi Jaringan				

5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	-	-		
6. Belanja Modal aset tak berwujud				
Jumlah Belanja Modal	33.200.000	33.027.257	99,48	20.677.000
JUMLAH BELANJA	2.415.075.000	1.982.595.731	82,09	3.308.745.128

Berdasarkan Tabel diatas Perbandingan Realisasi Belanja TA 2025 dengan TA. 2024 menunjukkan bahwa realisasi belanja pada TA. 2025 mengalami penurunan sebesar 15,9%.

Dengan rincian Belanja Operasi mengalami penurunan sebesar 15,9% dan Belanja Modal mengalami kenaikan sebesar 1,02 %.

- a) Belanja Operasi Realisasi belanja operasi sebesar Rp. 1.949.568.474 mencapai 79,77% dari anggaran sebesar Rp. 2.381.875.000 apabila dibandingkan dengan realisasi 2024 yang sebesar Rp. 3.288.068.128 mengalami penurunan sebesar 14,30 %.

➤ Belanja Modal

Belanja Modal	2025		(%)	Realisasi 2024 (Audited) (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
Belanja Tanah				
Belanja Peralatan dan Mesin	33.200.000	33.027.257	99,48	20.677.000
Belanja Gedung dan Bangunan				
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan				
Belanja Aset tetap Lainnya				
Belanja Aset Tak Berwujud				
Jumlah	33.200.000	33.027.257	99,48	20.677.000

Realisasi belanja modal tahun 2025 sebesar Rp 33.027.257 atau tercapai 99,48% % dari anggaran sebesar Rp 33.200.000 Dibandingkan realisasi tahun 2024 yang sebesar Rp 20.677.000 realisasi belanja modal tahun 2025 naik sebesar 1,02%.

Adapun rincian realisasi belanja modal adalah sebagai berikut:

Uraian	2025		(%)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
.Belanja Tanah			
Belanja Peralatan dan Mesin	33.200.000	33.027.257	99,48%
Belanja Gedung dan Bangunan			
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan			
Belanja Aset Tak Berwujud			
Jumlah	33.200.000	33.027.257	99,48%

2. Laporan Operasional

1. Pendapatan – LO

Pendapatan - LO Kabupaten Kebumen adalah Pendapatan untuk periode 1 Januari 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp2.200.000 dengan rincian sebagai berikut:

Realisasi Pendapatan – LO

No	Pendapatan – LO	2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Audited) (Rp)
1	PAD – LO	2.200.000	3.510.000
2	Transfer – LO		
3	Lain-Lain Pendapatan yang Sah – LO		
Jumlah		2.200.000	3.510.000

Dari tabel diatas dapat diketahui pendapatan LO tahun 2025 turun sebesar Rp1.310.000 atau sebesar 65,5 % dibandingkan tahun sebelumnya.

2. Beban - LO

Realisasi Beban OPD Kecamatan Prembun pada TA.2025 adalah sebesar Rp 1.899.021.293 dengan rincian sebagai berikut :

Rincian Beban TA 2024 dan 2023

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ Penurunan %
BEBAN	1.899.021.293,00	3.388.737.023,00	(43,96)
BEBAN OPERASI	1.899.021.293,00	3.279.519.627,00	(42,09)
Beban Pegawai	1.648.893.561,00	1.817.930.308,00	(9,30)
Beban Barang dan Jasa	250.127.732,00	1.461.589.319,00	(82,89)
JUMLAH BEBAN OPERASI	1.899.021.293,00	3.279.519.627,00	(42,09)
Beban Penyusutan dan Amortisasi	0,00	109.217.396,00	(100,00)
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	0,00	93.077.010,00	(100,00)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	0,00	16.015.386,00	(100,00)
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	0,00	125.000,00	(100,00)
JUMLAH Beban Penyusutan dan Amortisasi	0,00	109.217.396,00	(100,00)
JUMLAH BEBAN	1.899.021.293,00	3.388.737.023,00	(43,96)

a. Beban Operasi

Beban Operasi Tahun 2025 sebesar Rp 1.899.021.293 terdiri dari:

Realisasi Beban Operasi

No	Beban	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (%)
1	Beban Pegawai	1.648.893.561,00	1.817.930.308,00	(9,30)
2	Beban Barang dan Jasa	250.127.732,00	1.461.589.319,00	(82,89)
3	Beban Bunga	0	0	
4	Beban Subsidi	0	0	
5	Beban Hibah	0	0	
6	Beban Bantuan Sosial	0	0	
7	Beban Penyisihan Piutang	0	0	
8	Beban Lain - Lain	0	0	
	Jumlah	1.899.021.293,00	3.279.519.627,00	(42,09)

Dari tabel diatas dapat diketahui Beban Operasi LO tahun 2025 turun sebesar Rp 1.380.498.334 atau sebesar 42,09 % dibandingkan tahun sebelumnya.

a. Beban Pegawai

Realisasi Beban Pegawai Kecamatan Prembun Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 1.648.983.561

b. Beban Barang dan Jasa

Realisasi Beban Barang Jasa TA 2024 sebesar Rp 250.127.732

c. Beban Hibah

Realisasi Beban Hibah pada OPD Kecamatan Prembun TA 2024 sebesar Rp 0,00 dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah Beban	Penerima
1	2	3	4
1			
2	NIHIL		
3			
4			
6			
7			
	Jumlah		

d. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban penyusutan dan amortisasi sebesar Rp. 0,00 merupakan penyusutan atas aset tetap dan amortisasi atas aset lainnya dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi

NO	Jenis Beban	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1.	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	0,00	93.077.010,00
2.	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	0,00	16.015.386,00
3.	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	0,00	125.000,00
JUMLAH Beban Penyusutan dan Amortisasi		0,00	109.217.396,00

e. **Beban Penyisihan Piutang**

Beban Penyisihan piutang OPD Kecamatan Prembun tahun 2025 adalah sebesar Rp.0,00

Rincian Beban Penyisihan Piutang

No	Jenis Beban	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan	0	0
2	Beban Penyisihan Piutang Lainnya	0	0
	Jumlah	0	0

f. **Surplus/defisit – LO**

Surplus defisit – LO untuk tahun 2025 sebesar Rp.1.488.405.730 atau turun sebesar 43,97% dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp.3.385.227.023.

3. Neraca

1. Aset

a. Aset Lancar

Nilai Aset Lancar per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 562.000 dan Rp 562.000. Aset lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Rincian Aset Lancar pada OPD Kecamatan Prembun per 31 Desember 2025 disajikan pada Tabel berikut.

Tabel

Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2025 dan 2024

No.	Aset Lancar	TA 2025	TA 2024
1	Kas di Bendahara Pengeluaran	0.00	0.00
2	Kas di Bendahara Penerimaan	0.00	0.00
3	Kas Lainnya dan Setara Kas	0.00	0.00
4	Investasi Jangka Pendek	0.00	0.00
5	Piutang Pendapatan	0.00	0.00
6	Piutang Lainnya	0.00	0.00
7	Penyisihan Piutang	0.00	0.00

8	Beban dibayar di muka	0.00	0.00
9	Persediaan	562.000	562.000
	Jumlah	562.000	562.000

1) Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 0,00 dan Rp 0,00 . saldo ini merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TU/Pajak yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke OPD Kecamatan Prembun per tanggal neraca.

Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025

No	SKPD	Nilai (Rp)	Tanggal Penyetoran ke Kas Daerah
1.	Kecamatan Prembun	0	
2.			
3.			

2) Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar masing-masing Rp 0,00 dan Rp 0,00. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai yang berada dibawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa pelayanan dan pendapatan lain yang sah.

No	Nilai (Rp)	Tanggal Penyetoran ke Kas Daerah
1.	0	
2.		
3.		

3) Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp 562.000 dan Rp 562.000. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Adapun saldo persediaan sebesar Rp.562.000 merupakan saldo persediaan atas barang habis pakai / ATK yang belum habis/belum digunakan sampai dengan tanggal neraca.

No	Persediaan	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2024 (Audited) (Rp)
1.	Bahan Habis Pakai	562.000	562.000
2.	Bahan/Material	0,00	0,00
3.	Barang Lainnya	0,00	0,00
4.			
Jumlah		562.000	562.000

b. Aset Tetap

Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 2024 tersaji sebesar Rp 1.318.919.000 dan Rp 1.285.891.743. Aset Tetap yang tersaji merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas.

Rincian Aset Tetap OPD Kecamatan Prembun per 31 Desember 2024 dan 2023 disajikan pada Tabel berikut :

Rincian Aset Tetap

No	Jenis	T.A 2025	T.A. 2024
1	Tanah	431.379.000,00	431.379.000,00
2	Peralatan dan Mesin	1.219.132.486,00	1.186.105.229,00
3	Gedung dan Bangunan	841.169.333,00	841.169.333,00
4	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	5.000.000,00	5.000.000,00
5	Akumulasi Penyusutan	(1.177.761.819,00)	(1.177.761.819,00)
Jumlah Aset Tetap		1.318.919.000,00	1.285.891.743,00

Penjelasan Aset Tetap:

a. Tanah

Aset tetap berupa tanah tidak ada mutasi sehingga aset tanah nilainya tidak berubah, terdiri dari :

1. Tanah Kampung yang berada di Jalan Jeruk nomor 5 Prembun seluas 1.411 M² dengan nomor sertifikat 7 tanggal 15 April 1985.
2. Tanah Kampung yang berada di Jalan Jeruk Nomor 5 Prembun, seluas 6.952 M² dengan nomor sertifikat 3 tanggal 15 April 1985.
3. Tanah lapangan lainnya di Prembun seluas 7.614 M² dengan nomor sertifikat 8 tanggal 19 September 1986.

b. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin saldo awal Rp 1.186.105.229 dan saldo akhir Rp1.219.132.486 sehingga pada tahun 2025 ada tambahan mutase sebesar Rp 33.027.257, dengan perincian sebagai berikut :

1. Pengadaan mebel sebesar Rp 15.000.000;
2. Pengadaan peralatan dan mesin lainnya Rp 8.027.257,
3. Pengadaan sarana dan prasarana sebesar Rp 10.000.000,

2. Kewajiban

a) Kewajiban Jangka Pendek

Nilai Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2024 dan 2023 tersaji sebesar Rp 50.819.663,00 dan Rp 50.819.663,00

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kelompok kewajiban yang diharapkan segera diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

No.	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
		(Rp)	(Rp)
1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga	0,00	0,00
2	Pendapatan diterima Dimuka	0,00	0,00
3	Utang Belanja	1.838.020	51.385.201
4	Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00
Jumlah		1.838.020	51.385.201

Rincian utang belanja terdiri dari :

- Rekening tagihan Listrik sebesar Rp 1.093.904 yang dibayarkan pada tanggal 19 Januari 2025.
- Rekening tagihan air sebesar Rp 191.500 yang dibayarkan pada tanggal 19 Januari 2025.
- Rekening tagihan internet sebesar Rp 1.093.904 yang dibayarkan pada tanggal 19 Januari 2025.

3. Ekuitas

Ekuitas Dana Lancar

Ekuitas Dana per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp 1.317.642.980 dan Rp 1.234.068.542.

4. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Dari laporan ekuitas dapat dijelaskan sebagai berikut

1. Ekuitas Awal

Jumlah ekuitas awal sebesar Rp. 1.234.068.542 dan tahun anggaran 2024 Rp1.314.060.439.

2. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Koreksi Nilai Persediaan sebesar	Rp.	0
- Selisih Revaluasi Aset Tetap sebesar	Rp.	0
- Penilaian Kembali Aset Tetap sebesar	Rp.	0

3. Koreksi Lainnya

Koreksi lainnya senilai Rp. 0,00 merupakan koreksi atas pos-pos yang belum dibukukan sampai akhir Tahun 2025, terdiri dari:

- Pengakuan atas bunga yang terutang sebesar	Rp.	0
- Pengakuan atas beban dibayar dimuka sebesar	Rp.	0
- Lain-lain sebesar	Rp.	0

BAB IV

PENJELASAN DAN INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

Pemerintahan Kabupaten Kebumen merupakan bagian dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang terdiri 50 (lima puluh) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang seluruhnya tersebar di wilayah Pemerintah Kabupaten Kebumen untuk membuat laporan keuangan tahun 2025 dengan dasar hukum sebagai berikut :

- a. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah ;
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan dan Tata Kerja Kecamatan
- f. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 94 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 20 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrua.

Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kebumen sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan otonomi daerah yang termasuk dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah , Laporan Keuangan Kabupaten Kebumen disusun dengan memperhatikan Standar Akuntansi Pemerintahan Daerah dan Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang diberlakukan di Indonesia yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah.

BAB V

PENUTUP

Demikian Laporan Keuangan OPD Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2025 dibuat sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban keuangan yang harus dilaksanakan, sebagai konsekuensi dari penggunaan dana APBD, serta sebagai perwujudan akuntabilitas SKPD sebagai sebuah entitas akuntansi /pelaporan.

Kebumen, 03 Februari 2026
PENGGUNA ANGGARAN



MARTINUS YUDANTORO, S.STP. M.Si
Pembina Tk I
NIP. 19820623 200012 1 002